60

KOMITMEN DAN REALISASI DARI PRINSIP-PRINSIP KEHUTANAN

Dudung Darusman
(Guru Besar Madya Politik Ekonomi Kehutanan dan Ketua Lembaga Penelitian IPB)

Makalah Pembahas terhadap Makalah Utama
"Komitmen dan Realisasi dari Prinsip-Prinsip Kehutanan",
disampaikan pada Seminar Country Assesment Penerapan Hasil Pertemuan Rio,
yang diselenggarakan WALHI di Jakarta, 14 dan 15 Januari 1997

PENDAHULUAN

Bagi kehutanan Indonesia, pesan kesepakatan KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brasil, Juni 1992, adalah merupakan pesan agar pengelolaan dan pengusahaan hutan dilaksanakan secara profesional kehutanan. Karena sesungguhnya pengelolaan dan pengusahaan hutan dalam wujud hutan alam adalah merupakan pilihan yang unggul dari banyak segi, baik itu dari segi ekonomis, segi orientasi kepentingan masyarakat, segi kepentingan kelestarian sumberdaya alam hutan dan biodiversity, maupun segi pemeliharaan lingkungan hidup. Keunggulan-keunggulan potensial tersebut adalah harapan dan pesan yang terkandung secara integral dalam kesepakatan KTT Bumi tersebut di atas.

Sepulang dari KTT Bumi Juni 1992 yang lalu, kita penuh harapan akan terjadinya perubahan-perubahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Indonesia ke arah yang semakin baik dan profesional. Kita berharap 2 aktor utama kehutanan Indonesia, yakni Jajaran Pemerintah dan Jajaran Pengusaha HPH dan Industri Hasil Hutan, segera melakukan langkah-langkah nyata ke arah perbaikan-perbaikan.

Kita percaya, bahwa kedua aktor tadi telah melakukan langkah-langkah yang kita harapkan, namun karena bukti hasil-hasilnya belum jelas nampak kelihatan/terasa, maka kita dapat menyangka kedua aktor itu belumlah sungguh-sungguh; atau langkah-langkah yang ditempuh belum merupakan langkah strategis.

HAMBATAN-HAMBATAN

Dapat difahami, dan juga diamati terus pada hari-hari mendatang, bahwa pesan-pesan KTT Bumi, yang pada intinya adalah pesan penerapan pengelolaan dan pengusahaaan hutan secara profesional itu, telah dan akan terus sulit mencapai kemajuan, karena memang menghadapi hambatan-hambatan yang sangat "*inhibitive*". Sesungguhnya banyak hambatan-hambatan yang ada, namun pada kesempatan yang terbatas sekarang ini, dapat kita pelajari 2 hambatan strategis sebagai berikut.

1. Para profesional kehutanan belum diberikan kesempatan untuk menerapkan/ melaksanakan keprofesiannya.

Hal ini dapat diuji secara objektif melalui 4 dimensi penggunaan tenaga kerja sebagai berikut :

a. **Jumlah**, yakni berapa bagian posisi-posisi keprofesian kehutanan yang diisi oleh profesional kehutanan. Kita seringkali mengamati banyaknya HPH dan Industri Hasil Hutan yang masih terlalu sedikit menempatkan profesional kehutanan di posisi-posisi yang sesuai dalam perusahaannya.

b. **Kualifikasi**, yakni berapa bagian posisi-posisi keprofesionalan tersebut diisi dengan kualifikasi kehutanan yang cocok/sesuai dengan pemilahan keahlian Sarjana/Diploma Kehutanan yang betul-betul dikuasainya. Kita sering melihat para pengusaha suka menempatkan Sarjana/Diploma baru justru bukan pada bidang yang sesuai dengan bekal keahliannya.

c. **Bidang Pekerjaan**, yakni berapa bagian dari bidang-bidang pekerjaan profesi kehutanan (misalnya : perencanaan hutan, pembinaan hutan dan eksploitasi hutan) yang betul-betul diberikan kepada profesional kehutanan. Sering kita lihat bidang pekerjaan yang sangat strategis dari kepentingan profesi seperti eksploitasi hutan justru tidak diberikan kepada profesional kehutanan.

d. **Level Pekerjaan**, yakni pada sebaran level pekerjaan dari pekerja/pelaksana sampai ke pimpinan/pengambil keputusan, sampai level teratas apa profesional kehutanan ditempatkan. Kita hanya melihat satu-dua kasus saja dimana Sarjana/Diploma Kehutanan menempati posisi tinggi (pengambil keputusan) dalam perusahaan. Walaupun akhir-akhir ini memang banyak terlihat Direktur-direktur tertentu dipegang oleh profesional kehutanan, hal itu masih perlu diamati lebih lanjut apakah tidak lebih dari Direktur-direktur pajangan saja.

Sekedar contoh/ilustrasi, misalnya untuk kondisi kehutanan Indonesia sekarang, faktor *a* = *10 %*, faktor *b* = *70 %*, faktor *c* – *30 %* dan faktor *d* –*10 %*, maka tingkat/besarnya kesempatan yang telah diberikan kepada profesional kehutanan dalam menangani kehutanan Indonesia, barulah sebesar :

$$\boxed{\mathbf{a \times b \times c \times d = 0{,}1 \times 0{,}7 \times 0{,}3 \times 0{,}1 = 0{,}0021 = 0{,}21\ \%\quad (!,?)}}$$

Dengan angka hanya 0,21 % (yang seharusnya adalah 100 %), bagimana mungkin hutan dan kehutanan Indonesia akan dikelola dan diusahakan dengan baik, bagaimana mungkin pesan-pesan KTT Bumi akan segera diterapkan di Indonesia, karena berarti bahwa para pelaksana dan penentu keputusan-keputusannya sendiri yang sekarang berperan, khususnya dalam perusahaan HPH dan Industri Hasil Hutan, sangat jauh dari profesional [2]

2. *Masih Beratnya Penyakit "Ekonomi Biaya Tinggi"*

Perlu difahami bahwa setiap perubahan, termasuk ke arah perbaikan seperti pesan KTT Bumi, pada kesempatan pertama bagi para pengusaha adalah biaya tambahan (*extra costs*). Sejauh mana kesediaan mereka untuk melakukan perubahan adalah tergantung berapa besarnya menggunakan sebahagian dari keuntungan (profit) usahanya. Dalam keadaan ekonomi biaya tinggi, realisasi keuntungan yang diterima pengusaha cenderung mengecil, sehingga bahagian untuk melaksanakan perubahan semakin sedikit/sempit. Dalam keadaan seperti itu para pengusaha cenderung enggan dan menolak perubahan karena alasan tidak tersedianya biaya.

Tentu saja, kecenderungan menolak perubahan juga disebabkan karena rendahnya tingkat keprofesionalan mereka. Bagi yang tidak profesional kehutanan, langkah perubahan hanyalah dipandang sebagai peningkatan biaya saja, sementara bagi yang kuat dan tinggi keprofesionalan kehutanannya, perubahan akan dipandang sebagai investasi, yang nantinya akan kembali modal dan memberikan keuntungan lebih kepada investornya.

Sekedar ilustrasi betapa seriusnya penyakit "ekonomi biaya tinggi" di sektor kehutanan, dapatlah kita gunakan 2 sumber angka, yakni Sutopo dan Darusman (1992) menyatakan bahwa hanya 31 % saja bahagian dari rente ekonomi yang diterima Pemerintah dari pengusahaan hutan alam, sementara APHI (1994) merasa dan meyakini bahwa para pengusaha HPH telah mengeluarkan sekurang-kurangnya 84 % bahagian dari rente ekonomi tersebut. Kalau demikian, maka kira-kira sebesar 53 % bahagian dari rente ekonomi telah bocor menjadi biaya-biaya *irrelevant*/biaya-biaya siluman, akibat penyakit ekonomi biaya tinggi tersebut.

Semakin sempitnya kesempatan sumber dana untuk mengadakan perubahan, baik pada aktor Pemerintah (ilustrasi 31%) maupun pada aktor pengusaha (ilustrasi 16 %, barangkali benar) yang di satu sisi sebagai suatu masalah yang berat, dan di sisi lain juga berhadapan dengan monster "*trouble maker*"/para pelaku ekonomi biaya tinggi yang sudah kelewat kuat (ilustrasi 53 %) seperti ditunjukkan pada perhitungan di atas.

Ekonomi biaya tinggi yang kronis telah terjadi di tanah air ini karena terlalu banyaknya (melebihi sampai di luar-luar yang diperlukan) pihak yang ikut-ikutan meminta bagian tanpa memberi kontribusi nyata terhadap tingkat produktivitas sektornya. Sementara itu pihak-pihak tertentu yang sangat perlu diikutkan karena dapat secara nyata menambah produktivitas, ternyata ditinggalkan, seperti misalnya masyarakat sekitar hutan. Sudah lama sektor kehutanan menjadi ajang "kerubutan" dan keroyokan pihak yang tidak relevan dan tidak bertanggung jawab, baik secara keprofesian kehutanan maupun bisnis.

Apabila kedua hambatan yang telah diuraikan di atas dapat dicairkan atau disingkirkan, rasanya perubahan ke arah terwujudkannya kehutanan profesional dan terwujudkannya pesan-pesan kesepakatan KTT Bumi dapat secara bertahap dilaksanakan. Kita boleh membayangkan sektor kehutanan Indonesia yang mengangkat harkat dan derajat Bangsa dan Negara Indonesia di mata dunia, karena peranannya dalam pembangunan yang tinggi dan berkelanjutan serta menjadi penopang kekuatan dan kelestarian ligkungan ekosistem bagi kelangsungan hidup umat manusia di dunia.

KETEGUHAN KOMITMEN DAN UPAYA KEPROFESIAN KEHUTANAN

Tiada hidup tanpa harapan dan usaha. Walaupun kedua hambatan yang diuraikan di atas sudah dianggap sangat berat dan kronis, tidaklah mustahil untuk dipecahkan dan disingkirkan dari perjalanan hidup kita. Apapun dan sekecil apapun usaha yang dapat kita masing-masing lakukan, maka lakukanlah. Kalau tidak, maka kita semua akan segera kehilangan segalanya.

Secara kukuh kita pelajari segala kemungkinan penyebabnya dan kemudian sesuai dengan posisi dan kekuatan masing-masing berupaya memperbaiki yang dapat diperbaiki. Jangan frustasi dan putus asa, bila tidak mampu melakukan loncatan atau terobosan, ya selangkah demi selangkah, atau mugkin jengkal demi jengkal, sambil terus mengingat filsafat kehutanan : "*kita menanam, anak cucu memanen !*", artinya kita tidak usah berharap bahwa hasil dari segala upaya kita adalah kita sendiri yang akan menikmatinya. Mungkin itulah juga yang dimaksudkan agama, bahwa Tuhan memberi pahala atas besarnya dan benarnya upaya kita dan bukan atas dasar hasilnya yang dicapai.

Sementara kita belum mampu menunjukkan kepada dunia dalam melaksanakan pesan-pesan kesepakatan KTT Bumi, perlu diingat bersama bahwa ***memberi pekerjaan kepada yang berkeahlian dan memberi kesempatan kepada yang lebih berhak*** akan dapat lebih meyakinkan seluruh dunia, termasuk rakyat Indonesia, bahwa proses menuju terwujudnya pesan-pesan KTT Bumi dapat betul-betul dimulai di tanah air Indonesia ini.